

**AKREDITASI SEBAGAI PENJAMINAN MUTU LEMBAGA**  
**Studi Komparasi Pemenuhan SNP PKBM Pelita Pratama dan PKBM Siliwangi 2**  
**Kota Bandung**

Riyantini  
Dinas Pendidikan Kota Bandung  
riyantini@upi.edu

**ABSTRAK**

Pendidikan nonformal memiliki peran yang penting dalam memenuhi masyarakat dalam bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global yang makin nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut tentunya dapat kita pahami bersama, bahwa satuan pendidikan nonformal memiliki peran yang besar dalam melayani masyarakat yang tidak berkesempatan memperoleh layanan pendidikan di jalur formal. Agar layanan pendidikan kepada masyarakat dapat terjamin maka salah satu upaya pemerintah melaksanakan program meningkatkan mutu pendidikan nonformal. Diantaranya adalah penjaminan mutu lembaga dalam bentuk pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Studi komparatif dalam pemenuhan 8 (delapan) standar tersebut, peneliti lakukan terhadap PKBM Pelita Pratama yang sudah bersatus Akreditasi "B" dan PKBM Siliwangi 2 yang sedang memenuhi dan melengkapi dokumentasi yang berkaitan dengan akreditasi. Adapun dari perbandingan terhadap 2 (dua) lembaga tersebut, bahwa PKBM Siliwangi 2, masih perlu kerja keras. Baik untuk pimpinan dan pengelola untuk pencapaian standar minimal PKBM. Adanya perbedaan yang cukup prinsip pada pemenuhan 8 (delapan) SNP di PKBM Pelita Pratama dan PKBM Siliwangi. Sehingga untuk PKBM Siliwangi 2

**Kata kunci :** Akreditasi, Penjaminan Mutu PKBM.

**ABSTRACT**

Non-formal education has an important role in meeting the community in the field of education, especially in increasing human resources in facing global competition that is increasingly tangible and felt by the community. To face these challenges, of course we can understand together, that non-formal education units have a large role in serving people who do not have the opportunity to obtain educational services in the formal channels. So that education services to the community can be guaranteed, one of the government's efforts to implement programs is to improve the quality of non-normal education. Among them are quality assurance institutions in the form of fulfillment of 8 (eight) national education standards consisting of Graduates' Competency Standards, Content Standards, Process Standards, Educators and Education Personnel Standards, Management Standards, Infrastructure Standards, Financing Standards and Education Assessment Standards. This type of research is a comparative study in fulfilling the 8 (eight) standards, researchers conducted on the Pelita Pratama PKBM which has the status of "B" and Siliwangi 2 PKBM which have fulfilled and completed the documentation related to accreditation. As for the comparison of the 2 (two) institutions, that PKBM Siliwangi 2, still needs hard work. Good for leaders and managers to achieve the minimum standards for PKBM. There is a pretty difference in principle in the fulfillment of 8 (eight) SNPs in Pelita Pratama PKBM and Siliwangi PKBM. So for PKBM Siliwangi 2

**Keywords:** Accreditation, PKBM Quality Assurance.

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan noformal dan sudah menjadi kebijakan nasional adalah penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ini adalah kegiatan yang sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan Bangsa melalui pendidikan. Agar mutu pendidikan nonformal sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan masyarakat, maka perlu adanya standar yang dijadikan patokan (*benchmark*). Setiap satuan pendidikan nonformal secara bertahap dikembangkan untuk menuju pencapaian standar yang dijadikan acuan tersebut. Acuan ini bersifat nasional, dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Dengan demikian acuan mutu pendidikan merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka satu satunya upaya penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal adalah akreditasi untuk setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Data yang diperoleh dari Bidang PP PAUD dan Dikmas Kota Bandung tahun 2018, saat ini baru 64,81% atau sejumlah 35 lembaga yang sudah terakreditasi dari 54 lembaga dan masih 35,18% atau sejumlah 19 lembaga yang belum terakreditasi. Sedangkan target Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki target tahun 2019 seluruh pusat kegiatan belajar masyarakat dapat terakreditasi dengan nilai B. Kebutuhan satuan PKBM akan akreditasi ini dipicu oleh kebutuhan teknis dimana sudah dikeluarkan regulasi yang mewajibkan hanya satuan PKBM yang telah terakreditasi saja yang dapat menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Maka Akreditasi bukan saja sekedar kebutuhan, tetapi juga merupakan keharusan. PKBM yang tidak terakreditasi akan kesulitan untuk mengembangkan program programnya terutama salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan perbandingan terhadap 2 (dua) satuan PKBM yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi, diharapkan melalui studi komparatif ini, kiranya dapat memperoleh data serta kendala satuan PKBM dalam pemenuhan SNP. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 1). Untuk mengetahui Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di PKBM Pelita Pratama dan PKBM Siliwangi 2. 2). Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang membedakan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di PKBM Pelita Pratama dan PKBM Siliwangi 2.

## METODE PENELITIAN

Menurut Silalahi, Uber (2010; hal. 110) Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat juga berupa deskriptif (*descriptive comparative*) maupun komparatif korelasional (*comparative corelational*). Komparatif deskriptif untuk membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Selanjutnya menurut Hasan (2002: hal. 126-127) analisis komparasi atau perbandingan adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok variabel atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji. Komparasi dua sampel yang saling lepas atau independen yaitu sampel sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel lainnya. Sedangkan Arikunto Suharsini (2010; hal 310) mengatakan bahwa dalam penelitian komparasi dapat menemukan persamaan persamaan dan perbedaan perbedaan tentang benda benda, tentang orang, prosedur kerja, ide ide, kritik terhadap orang kelompok, terhadap ide atau prosedur kerja. Lebih lanjut dikatakan oleh Aswani Sujud dalam Arikunto Suharsimi (2010; hal. 311) bahwa analisis data non hipotesis, peneliti mengadakan komparasi status fenomena dengan standarnya.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang sudah dibakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan Pnf dan pada penelitian ini jawaban dari setiap item pertanyaan kuesioner menggunakan skala interval, yakni skala yang memiliki gradasi dan penafsiran Pemenuhan SNP sebagai berikut :

Tabel 1 Penafsiran Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

No.	Nama Penilaian	Rentang Skor	Intepretasi
1	Pemenuhan Komponen SNP	75% - 100 %	Sangat Baik
2		50% - 74 %	Baik
3		25 %- 49 %	Cukup Baik
4		0 % - 24 %	Kurang Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, ssebagai berikut :

Lokasi di PKBM Pelita Pratama Jl. Surapati 55E Lt2 Kecamatan Coblong, dan PKBM Siliwangi 2 Jl Patrakomala No. 62 kecamatan Sumur Bandung, dilakukan observasi dan wawancara serta sudi dokumentasi pada tanggal 17 April – 8 Mei 2019. Pemenuhan 8 (delapan) standar, terhadap 2 (dua) lembaga sebagai berikut :

Standar Kompetensi Lulusan, PKBM Pelita Pratama sudah sesuai dengan layanan program dan SNP, PKBM Siliwangi 2 untuk perumusan Visi misi lembga masih belum spesifik, dan harus diperbaiki kembali. Karena visi misi ini memberikan gambaran umum tujuan dari pelayanan program yang ada di lembaga.

Standar Isi ; pada PKBM Pelita Pratama, sudah memenuhi standar dan komponen yang ada. Sedangkan PKBM Siliwangi masih dilengkapi pemenuhan stdar isi terutama pada aspek panduan evaluasi pembelajaran, dan praktek keterampilan peserta didik masih kurang. Serta penyusunan kalender pendidikan PKBM Siliwangi.

Standar Proses ; pemenuhan standar proses yang meliputi 5 aspek, maka PKBM Siliwangi dalam pemenuhan standar proses masih perlu pebimbingan dan pembinaan lebih lanjut.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; PTK di PKBM Siliwangi 2 harus ditingkatkan kualifikasi kependidikannya sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidiknya. Sedangkan di PKBM Pelita Pratama standar kulaifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara rutin diselenggarakan workshop untuk peningkatan kompetensi secara mandiri.

Standar Sarana dan Prasarana; untuk PKBM Siliwangi 2 Pemenuhan bahan ajar belum seimbang dengan jumlah peserta didik yang mencapai 129 orang, dengan perbandingan bahan ajar 1: 5. Tidak tersedianya bahan praktek untuk setiap program utama, yaitu penddidikan kesetaraan Paket C, dan inventarisir sarana prasarana yang dipergunakan oleh Peserta didik, serta kantor sekertariat PKBM masih belum memadai karena sedang direnovasi dari yayasan patra komala.

Standar Pengelolaan ; Pemenuhan Program pengembangan dana untuk menopang program yang diselenggarakan oleh PKBM, artinya lembaga tidak hanya kebergantungan atas dana bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kota Bandung. Namun harus memiliki pengembangan subsidi dana yang dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sehingga lembaga akan lebih mandiri. Pengelolaan PKBM berdasarkan Permendikbud N0. 57 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan PKBM, rupanya untuk PKBM Siliwangi 2 masih belum terpenuhi dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala dari perubahan perubahan struktur Yayasan serta proses pembangunan lokasi pembelajaran di SD Patrakomala akan sangat bergantung pada Kepala SD Patra Komala.

Standar Pembiayaan ; Pemenuhan terhadap pembiayaan pendidikan di PKBM Siliwangi perlu dilengkapi dan sesuai dengan prosedr (SOP) lembaga.

Standar Penilaian Pendidikan ; Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian lebih untuk PKBM Siliwangi 2 yaitu : Perlunya dilengkapi rencana penilaian untuk seluruh jenis Program, Variasi jenis penilaian pendidikan yang dilakukan oleh pendidik. Dokumentasi hasilpenilaian pembelajaran sudah mendekati

ketentuan, Pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik dan Peserta didik yang berprestasi direncanakan dalam program kegiatan tahunan lembaga yang di susun melalui RAKS.

### **KESIMPULAN**

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di PKBM Pelita Pratama dan PKBM Siliwangi ada perbedaan yang menonjol dalam setiap pencapaian standar.

PKBM Pelita Pratama yang sudah terakreditasi sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan saat peneliti melakukan studi komparatif, dokumen dokumennya masih tertata dengan baik dalam satu folder sesuai dengan standarnya. Sehingga memudahkan bagi siapaun untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pengelolaan PKBM.

PKBM Siliwangi 2, sebenarnya sudah pernah mengikuti akreditasi pada tahun 2006, hanya dengan banyaknya perubahan susunan Yayasan dan struktur organisasi serta paradigam tentang pusat kegiatan belajar masyarakat menjadi satuan pendidikan . tentunya tidaklah mudah bagi pengelola sekarang untuk tetap bertahan dan dapat melayani kebutuha masyarakat dalam bidang pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto Suharsimi (2010) *Prosedur Penelitian*, Bandung, Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi,(2010) *Jakarta Penilaian Program Pendidikan*, Bina Aksara.
- BAN PNF, 2014, *Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PNF Tahun 2014*.
- BAN PNF, 2014, *Instrumen Akreditasi PKBM*, Jakrta BAN PNF.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2012, *Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Jakarta Kemdikbud
- Jamal Ma'mur Asmani, (2010) *Tips praktis membangun dan mengolah administrasi sekolah*,Jogjakarta:Diva Press
- Permendikbud 13 tahun 2018, *Kemdikbud RI*. Jakarta
- Permendikbud No 59 Tahun 2012 *Tentang Badan Akreditasi Nasional*.
- Nana Syaodih Kartadinata,2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung
- Silalahi, Uber, (2010) *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Refika Adhitama
- Suparjan & Hempri Suyatno, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta
- Undang Undang No. 20 tahun 2013 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Zanzibar Sholeh,2005, *Analisis Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya Bandung.